

STUDI KEBERTERIMAAN STAKEHOLDER BERBASIS MEDIA TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PLTN DI KALIMANTAN BARAT

Mudjiono¹, Siti Alimah¹, Edwaren Liun¹, Dedy Priambodo¹, Adhi Nugraha²

¹ Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN)-BATAN, Jl. Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Indonesia

² Biro Hukum Humas dan Kerjasama-BATAN, Jl. Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Indonesia

email: mudzi@batan.go.id

ABSTRAK

STUDI KEBERTERIMAAN STAKEHOLDER BERBASIS MEDIA TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PLTN DI KALIMANTAN BARAT. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pengambilan suatu kebijakan tidak lepas dari keterlibatan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*). Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat merupakan kebijakan publik yang kepentingan dan konsekuensinya tidak terlepas dari keterlibatan *stakeholder*. Keberterimaan dan keterkaitan *stakeholder* merupakan unsur yang penting dalam membangun infrastruktur disamping penerimaan masyarakat dan pengambil keputusan (*decision maker*). Studi keberterimaan *stakeholder* terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat diantaranya dapat dilakukan dengan basis peliputan media baik *online* maupun *offline*. Sebaran pernyataan *stakeholders* di media akan diamati dari bulan Januari 2017 hingga bulan Agustus 2019. Tujuan studi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat keberterimaan *stakeholder* terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat berbasis media. Metode yang digunakan adalah mencermati dan menganalisis pernyataan *stakeholders* di Media. Hasil studi yang diperoleh bahwa keberterimaan *stakeholder* yang terpantau pada media menunjukkan kecenderungan *tone* yang positif sebesar 93,67% dan negatif sebesar 6,33% terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.

Kata kunci: keberterimaan, PLTN, *stakeholder*, media

ABSTRACT

STUDY OF ACCEPTANCE OF MEDIA-BASED STAKEHOLDER ON PLTN DEVELOPMENT PLAN IN WEST KALIMANTAN. Public policy is a series of interrelated choices made by government agencies or officials in fields involving governmental tasks, such as defense of security, energy, health, education, public welfare, crime, urban areas and others. Taking a policy cannot be separated from the involvement of stakeholders. The Nuclear Power Plant (NPP) development plan in West Kalimantan is a public policy of interest and the consequences are inseparable from the involvement of stakeholders. The acceptance and relevance of stakeholders is not important in building infrastructure. Besides community acceptance and decision making. The study of stakeholder acceptance of the planned nuclear power plant construction in West Kalimantan was agreed to be carried out on the basis of media coverage both online and offline. The distribution of stakeholder statements in the media will be seen in January 2017 to August 2019. The aim of the study is to determine the level of stakeholder acceptance of the planned nuclear-based nuclear power plant development in West Kalimantan. The method used is to examine and analyze consenting stakeholders in the media. The study results obtained that stakeholder acceptance monitored in the media showed a positive tendency of 93.67% and negative 6.33% towards the planned construction of the NPP in West Kalimantan.

Keyword: acceptance, NPP, stakeholder, media

PENDAHULUAN

Pro dan kontra terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat menjadi bahasan yang menarik di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai keselamatan dan keamanan dari PLTN[1]. Kekhawatiran masyarakat

muncul apabila PLTN tersebut mengalami kebocoran yang akan merusak alam yang berada di sekitarnya.

Disisi lain, media telah melaporkan tingkat penerimaan masyarakat Indonesia terhadap rencana pembangunan PLTN pada tahun 2016 sebesar 77,53% dengan responden sebanyak 4.000 meliputi 34 propinsi. Bila dibanding tahun sebelumnya ada peningkatan penerimaan yaitu pada tahun 2011 sebesar 49,5%, tahun 2012 (52,9%), 2013 (64,1%), 2014 (72 %), dan 2015 (75,3%). Hasil tingkat penerimaan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia mendukung terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia. *Tren* positif terhadap tingkat penerimaan masyarakat sejak kecelakaan PLTN Fukushima pada tahun 2011 tersebut memberikan pijakan yang kuat terhadap program nuklir di Indonesia[2-9].

Pembangunan PLTN akan melibatkan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) dalam segala tingkatan di sebuah institusi manapun akan memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungan manfaat kepada institusi ataupun lembaga[10]. Secara etimologi bahwa *stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, *stake* dan *holder*. Secara umum, kata *stakeholder* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan[11]. Berdasarkan penjabaran diatas, secara garis besar konsep stakeholder sebagai individu atau organisasi baik profit maupun non profit yang memiliki kepentingan dengan lembaga sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan lembaga. Selain itu, stakeholder semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh lembaga[12].

Salah satu cara untuk mengetahui pengaruh stakeholder terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat dengan mengamati pernyataan-pernyataan yang dikemukakan melalui media massa baik *offline* maupun *online*. Dengan mengikuti kecenderungan stakeholder terhadap rencana pembangunan PLTN akan dapat dipetakan *tone* yang dinarasikan.

POKOK BAHASAN

Stakeholder dan Keberterimaan

Sebagaimana yang dilaporkan dalam laman *maxmanroe* bahwa Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Klasifikasi stakeholder utama (*Primer*) akan berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan[13]. Sedangkan Stakeholder Pendukung (*Sekunder*) adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Dalam rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, stakeholder utama adalah Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Kelompok inilah yang nantinya akan berinteraksi langsung terhadap dampak dan manfaat yang bisa diperoleh dalam pembangunan PLTN[14]. Pemerintah menurut pandangan Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah[15], yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilizaton Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)(Guritno, 2000:2).

Swasta atau pengusaha merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan ketersediaan listrik yang stabil dan memadai. Swasta yang bergerak di bidang industri, disamping memperoleh manfaat langsung listrik untuk keperluan perusahaan, juga dapat berperan dalam pembangunan hingga pengoperasian PLTN sebagaimana yang ditargetkan. Sedangkan masyarakat yang akan memperoleh manfaat pemakaian listrik untuk

keperluan sehari-hari. Masyarakat adalah kelompok yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program.

Stakeholder Pendukung mempunyai posisi menyuarakan keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyampaikan pandangan yang dapat mempengaruhi sikap stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah[13]. Katagori stakeholder dalam hal ini seperti lembaga pemerintah namun tidak bertanggungjawab langsung, atau lembaga pemerintah yang tidak mempunyai hubungan permasalahan secara langsung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi.

Media

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata media adalah alat; sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk; yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya); perantara; penghubung. Sedangkan Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas[16]. Menurut Faranita Surwi, ddk, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima[17]. Sedangkan menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media online sebagai berikut: media *online* adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet[18]. Berita di media dapat berdampak secara psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. Setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh[19-22].

Nada tulisan (*tone of writing, tone in writing*) adalah "intonasi" kata atau kalimat dalam tulisan[23]. *Tone* dalam nada pemberitaan dapat positif, negatif atau netral. Positif bila ada penjelasan lebih rinci "dukungan" tentang program/*event* perusahaan/lembaga yang diberitakan. Netral bila beritanya hanya sekilas, tidak rinci. Negatif bila isi berita itu tidak sesuai dengan harapan perusahaan atau memberitakan permasalahan yang menjadi permasalahan sebuah perusahaan[24].

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan pengumpulan data sekunder terkait permasalahan, selanjutnya dinalisis keberterimaan stakeholder terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat dengan mengamati pernyataan-pernyataan di media. Dalam studi ini, yang ditinjau adalah kecenderungan *tone* stakeholder yang dinarasikan pada media baik *offline* maupun *online* terhadap rencana pembangunan PLTN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan media terhadap liputan rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat diketahui sebanyak 79 kali pemberitaan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2018 dan 2019. Media yang melakukan pemberitaan baik cetak maupun elektronik dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Praktis untuk tahun 2017 tidak ditemui pemberitaan rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Stakeholder yang telah menarasikan pernyataan di media terjaring sebanyak 21 orang/Lembaga dengan latar belakang tugas dan fungsi yang berbeda baik masyarakat biasa, swasta maupun Lembaga pemerintah. Hasil pengamatan liputan pernyataan stakeholder di media ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Liputan Pernyataan Stakeholders di Media

Pemberitaan Per Tahun	Tahun / Jumlah Media			Jumlah Stakeholders
	2017	2018	2019 (s/d Agustus)	
	0	21	58	21
Prosentase	0	26,58%	73,42%	

Pantauan pemberitaan tentang rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat secara detail ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil pantauan media diperoleh bahwa pada tahun 2017 secara praktis tidak ditemukan, sedangkan pada tahun 2018 diperoleh 21 kali yang tersebar di bulan Oktober, Nopember dan Desember. Pada tahun 2019 sebanyak 58 kali pemberitaan yang diliput media yang terbit setiap bulan, hingga puncaknya pada bulan Agustus terpantau 33 kali pemberitaan. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi penguatan pembicaraan tentang rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat di tahun 2019 sebesar 73,42% dibanding tahun 2018 hanya 26,58%.



Gambar 1. Pemberitaan rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat yang diliput oleh media dari tahun 2018 hingga Agustus 2019.

Bila ditinjau dari stakeholder yang membicarakan rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat terpantau 21 stakeholder dengan sebaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 yang meliputi 10 Lembaga Pemerintah, 2 Perguruan Tinggi, 4 Organisasi Massa (LSM), 1 Partai Politik, 1 dari unsur swasta, dan 3 dari kalangan masyarakat biasa. Hasil analisis terhadap substansi pernyataan stakeholder diperoleh bahwa kecenderungan *tone* positif sebesar 93,67%, sedangkan nada *tone* negatif sebesar 6,33%. Pernyataan positif dari stakeholder bahwa keberadaan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi listrik saat ini dan rencana ke depan, sedang *tone* negatif karena kekhawatiran terhadap kebocoran radiasi dan berpendapat masih ada energi lain yang bisa dimanfaatkan.

Tabel 2. Sebaran Stakeholder dan *Tone* Pemberitaan

NO	STAKEHOLDER	2017	2018			2019								Jumlah Pemberitaan	Tone
			Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust		
1	Komis VII DPR RI	-	5	4	-	-	6	-	-	-	-	-	-	15	Positif
2	DPRD Kalbar	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	5	Positif
3	Ketua DPD	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	19	21	Positif
4	Sesjen DPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Positif
5	Kemenristekdikti, Staf Ahli	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	1	3	10	Positif
6	Gubernur Kalbar	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	Positif
7	Bupati Kubu Raya Kalbar, Rusman Ali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Positif
8	Balitbangda Pemprov Kalbar	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Positif
9	Wahli	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Negatif
10	Walhi Kalbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	Negatif
11	Bidang Energi dan SDM (KEIN), Zulnihar Umar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Positif
12	Thorcon Internasional	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Positif
13	Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Positif
14	Universitas Tanjungpura, Dekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	Positif
15	Partai Golkar	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	Positif
16	HIMNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Positif
17	Universitas Negeri Semarang (UNNES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Positif
18	Pengamat Energi Mamit Setiawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Positif
19	BAPETEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Positif
20	Anggota Masyarakat, YA (Inisial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Negatif
21	Anggota Masyarakat, Wijanarko, Alumni STTN Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Positif

Jumlah Liputan di Media Per Bulan	0	5	8	8	1	6	2	3	6	3	4	33
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Jumlah Total Liputan Selama Pengamatan (3 tahun)	79	Tone Positif = 93,67%	Tone Negatif = 6,33%
--	----	-----------------------	----------------------

KESIMPULAN

Dari hasil analisis media dapat disimpulkan bahwa pernyataan stakeholder terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat terpantau 79 kali pemberitaan dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2017 s/d 2019. Terdapat 21 stakeholder yang mengeluarkan pernyataan terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, meliputi 10 Lembaga Pemerintah, 2 Perguruan Tinggi, 4 Organisasi Massa (LSM), 1 Partai Politik, 1 dari unsur swasta, dan 3 dari kalangan masyarakat biasa. Secara dominan bahwa stakeholder yang diamati dengan berbasis media menunjukkan keberterimaan terhadap rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, dengan kecenderungan **tone positif** sebesar 93,67%. Sedangkan dengan **tone negatif** sebesar 6,33%. Pernyataan positif dari stakeholder bahwa keberadaan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi listrik saat ini dan rencana ke depan, sedang **tone negatif** karena kekhawatiran terhadap kebocoran radiasi dan berpendapat masih ada energi lain yang bisa dimanfaatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir yang telah memberikan ruang dalam penelitian ini, khususnya kepada Kepala Bidang Kajian Data Tapak yang telah memberikan pengarahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan sesama peneliti yang telah memberikan sumbangsih data dan analisis sehingga dapat dikomunikasikan dalam bentuk makalah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ELGIANTS, "Pro Kontra Pembangunan PLTN di Kalbar", Suara Pemred Kalbar, 23 Agustus 2019 10:00
- [2] <https://www.suarapemredkalbar.com/berita/bengkayang/2019/08/23/pro-kontra-pembangunan-pltn-di-kalbar>.
- [3] "BATAN Klaim 77,53 Persen Masyarakat Dukung PLTN", Itech Magazine, 10 Januari 2017
- [4] <http://itechmagz.com/2017/01/10/batan-klaim-7753-persen-masyarakat-dukung-pltn/>
- [5] "Hasil Survei PLTN Sebut Masyarakat Inginan Listrik Murah", Warta10, 10 Januari 2017,
- [6] <http://nasional.warta10.com/hasil-survei-pltn-sebut-masyarakat-inginan.105338.html>
- [7] "Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan PLTN Naik Jadi 77,53%", OG Indonesia, 10 Januari 2019,
- [8] <http://www.og-indonesia.com/2017/01/dukungan-masyarakat-terhadap.html?m=1>
- [9] "77,53 Persen Masyarakat Dukung Pembangunan PLTN", Cakrawala News, 10 Januari 2017,
- [10] http://drive.batan.go.id/gunber/2017/2017-01-10%20www.cakrawalanews.co.id_Masyarakat%20Dukung%20Pembangunan%20PLTN.pdf
- [11] "77,53% Masyarakat Indonesia Dukung Pembangunan PLTN", Warta Ekonomi, 10 Januari 2017,
- [12] <http://wartaekonomi.co.id/berita126918/7753-masyarakat-indonesia-dukung-pembangunan-pltn%C3%82%C2%A0.html>
- [13] Hasil Survei PLTN Sebut Masyarakat Inginan Listrik Murah", Sinar Indonesia Baru, 11 Januari 2017.
- [14] <http://hariansib.co/view/Dalam-Negeri/149394/Hasil-Survei-PLTN-Sebut-Masyarakat-Inginkan-Listrik-Murah.html>
- [15] HARY,"Survei : 77,53% Masyarakat Dukung Keberadaan PLTN", Jakartakita.com, 11 Januari 2017
- [16] <http://jakartakita.com/2017/01/11/survei-7753-masyarakat-dukung-keberadaan-pltn/>
- [17] "77,53 Persen Masyarakat Dukung Pembangunan PLTN", 11 Januari 2017, Koransulindo.com
- [18] <http://koransulindo.com/7753-persen-masyarakat-dukung-pembangunan-pltn/>
- [19] MUNWAROH dan KHOLIFATUL,"Koordinasi Multistakeholder dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (studi tentang Koordinasi Multistakeholder di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)", Tugas Akhir, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm.32- 33, 2016.
- [20] <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=stakeholder>

- [21] SISKI OKTAVIA dan AHARUDDIN, "Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor", *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Desember 2013, hlm : 231-246
- [22] "Pengertian Stakeholder: Klasifikasi, Peran dan Fungsi Stakeholder",
[23] [<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-stakeholder.html>]
- [24] "Diskusi Pemangku Kepentingan Mengenai Pengembangan Energi di Kalimantan Barat", <https://www.bapeten.go.id/berita/diskusi-pemangku-kepentingan-mengenai-pengembangan-energi-di-kalimantan-barat-101551>
- [25] "Fungsi Pemerintah", <http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>
- [26] "Kamus Besar bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/media>
- [27] FARANITA SURWI, dkk., "Pengembangan Media Pembelajaran Pada Mata Kuliah Pembangkit Tenaga Listrik", Laporan Penelitian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 207
- [28] "Perbedaan Media Online, Website, Media Sosial, dan Jejaring Sosial",
[29] <https://www.baticmedia.com/2015/05/perbedaan-media-online-website-media.html>
- [30] SAID LESTALUHU, "Peran Media Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 19 No. 1, April 2015: 01-15
- [31] "Media Sebagai Kontrol Sosial", *Liputan 6*, 10 Jan 2014,
[32] <https://www.liputan6.com/citizen6/read/797200/media-sebagai-kontrol-sosial>
- [33] "9 Fungsi Pers Dalam Media Kontrol Sosial",
[34] <https://pakarkomunikasi.com/fungsi-pers-dalam-media-kontrol-sosial>
- [35] MARYAM S.P, "Perang Media Massa Sebagai Kontrol Sosial", 27 Oktober 2014,
[36] <http://artikel-opiniku.blogspot.com/2014/10/peran-media-massa-sebagai-kontrol-sosial.html>
- [37] "Pengertian dan Jenis-Jenis Nada Tulisan", *Romeltea Media*, 20 Januari 2019,
[38] <https://www.romelteamedia.com/2019/01/pengertian-dan-jenis-jenis-nada-tulisan.html?m=0>
- [39] "Media Content Analysis "Versi" Public Relations (2)", 19 Desember 2010,
[40] <https://imultidimensi.wordpress.com/2010/12/19/media-content-analysis-versi-public-relations-2/>
- [41] EDHY ARUMAN, "Agenda Media, Publik, dan Public Relations", 10 Juli 2018,
[42] <https://mix.co.id/corcomm-pr/agenda-media-publik-dan-public-relations/>